

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kesimpulan Hasil Penelitian Analisis Perkembangan Keberhasilan Desentralisasi Fiskal Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015-2020 adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Manggarai Timur beragam dari tahun ke tahun. Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan hanya pada 5,48%, tahun 2017 sebesar 10,3%, tahun 2018 sebesar 4,67%, Tahun 2019 sebesar 5,40% dan untuk tahun 2020 sebesar 5,09%, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Manggarai Timur masih terbilang rendah sekali. Pemerintah daerah belum mampu membiayai kegiatan pemerintahan, aktivitas pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri. Sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada campur tangan pemerintah pusat.
2. Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Manggarai Timur diukur dari lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020. Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 rasio desentralisasi Kabupaten Manggarai Timur termasuk dalam kategori sangat kurang karena berada dalam skala interval  $0,00 < 10,00$ , dengan tingkat presentase 5,11%, 9,35%, 4,28%, 4,28%. Sedangkan tahun 2020 berada pada kategori sangat baik dengan skala interval  $> 50,000$  dengan presentase 47,78%.

3. Rasio Indeks Kemampuan Rutin tahun 2016-2020 menunjukkan keadaan sangat kurang. rasio indeks kemampuan rutin mencapai 1,45%, 2,92%, 14,07, 13,41, 14,94. ini terjadi karena pemerintah kabupaten manggarai timur kurang mampu mengoptimalkan perolehan PAD daerah dan selama ini lebih banyak tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat.
4. Rasio Pertumbuhan PAD yang dihasilkan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2016-2020, tahun 2016 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 63,81%, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 94,68%, tahun 2018-2020 rasio pertumbuhan mengalami penurunan. Untuk tahun 2018 sebesar -48,75%, tahun 2019 sebesar 23,69%, tahun 2020 sebesar -12,64%.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal – hal berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Manggarai Timur mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain di bidang Pariwisata. Apabila pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mampu memaksimalkan potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk mendukung peningkatan pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara

benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa perkembangan keberhasilan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio yang lebih banyak dan bisa menggambarkan keadaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdul, Haq., 2015 '*Desentralisasi Fiskal penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah*'. [www.wikiapbn](http://www.wikiapbn).
- Aulia Zhufinsa Nur Rahmatina. (2011). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005-2009*. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung..
- Effendi,D & Wuryanti 2011. "*Analisis Perkembangan Kemampuan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ngajuk*", Universitas Muhammadiyah Semarang. Skripsi
- Haryanto 2004. "*Analisis Efektivita, Kemandirian, Dan Desentralisasi Pemerintahan Kota Medan Tahun 2009-2013*", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Herwastoeti. (2010). *Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah*. *Humanity*, Vol.100, (No. 2), pp.100-108.
- <https://www.manggaraikab.go.id> 4/12/2019 upaya penataan penyelenggaraan Otonomi Daerah secara komprehensif.
- Kompas, 7/11/2019 pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari pusat.
- Machfud Siddik 2014 *Evaluasi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan*.
- Mahmudi, (2010:142) "*Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya*".
- Mitasari, Desy., 2016. '*Ilmu ekonomi dan studi pembangunan: Analisis tingkat kemandirian, perkembangan serta prospek keuangan daerah berdasarkan derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten Manggarai*', Universitas Muhamadiyah Malang.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Disentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sun'an dan senuk., 2017 *mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta 2004.*

Rinaldi 2012. “ *Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Bengkayang*”,

Syahputra R. (2017). *Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12-21.*